

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Untuk mewujudkan perekonomian yang mandiri, pemerintah mulai mengurangi pembiayaan yang berasal dari luar negeri dan mengoptimalkan pembiayaan dari sektor pajak. Menurut UU No.28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sekitar 78% penerimaan negara Indonesia saat ini bersumber dari penerimaan pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak sampai 31 Desember 2013 dalam APBN-P 2013 mencapai Rp 1.099,9 triliun dari target Rp 1.139,3 triliun. Realisasi ini lebih tinggi dibandingkan pencapaian APBN dalam kurun waktu dua tahun terakhir, dimana realisasi penerimaan pajak pada APBN-P 2012 adalah Rp 1.021,8 triliun dari target Rp 1.016,2 triliun, dan APBN-P 2011 adalah Rp 873,9 triliun dari target Rp 878,7 triliun ([www.anggaran.depkeu.go.id](http://www.anggaran.depkeu.go.id)).

Segala upaya dilakukan pemerintah dalam upaya peningkatan pendapatan negara dari pajak guna mencapai sasaran pembangunan

ekonomi yaitu diantaranya dengan adanya reformasi perpajakan. Reformasi sistem perpajakan di Indonesia sejak tahun 1983 menerapkan *Self Assesment System (SAS)* yang sebelumnya memakai *Official Assesment System (OAS)*. Perubahan sistem perpajakan tersebut dilakukan karena dengan menerapkan *Self Assesment System (SAS)* wajib pajak turut terlibat aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak mengetahui cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan jumlah pajak terutang dari wajib pajak yang bersangkutan. Perubahan ini juga mendukung efisiensi pelaksanaan sistem perpajakan.

Upaya lain yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak adalah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak. Ekstensifikasi pajak adalah kegiatan untuk mencari sesuatu yang sembunyi yaitu subyek pajak yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak tetapi belum terdaftar sebagai wajib pajak, sedangkan Intensifikasi pajak adalah usaha dari pihak pajak untuk menambah jumlah penerimaannya dari pajak yang terhutang. Salah satu upaya intensifikasi yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan setoran pajak dari sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).

Salah satu faktor yang menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Penyebab Rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain pelayanan petugas fiskus yang rendah ; persepsi wajib pajak mengenai pajak dan kurangnya pengetahuan pajak oleh wajib pajak (Supriyati dan Nurhidayati, 2008). Beberapa fenomena kasus-

kasus di dunia perpajakan Indonesia belakangan ini membuat masyarakat dan wajib pajak khawatir dan resah untuk membayar pajak. Kondisi yang seperti itu dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena mereka tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Oleh karena itu, beberapa wajib pajak dan masyarakat berusaha menghindari pajak.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara. Penelitian yang dilakukan oleh Rika Rahmadian, Murtedjo (2011) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan.

Faktor yang lain adalah pelayanan fiskus atau petugas pajak. Banyak wajib pajak yang selama ini berpersepsi negatif pada petugas pajak yang terlihat pada rendahnya pelayanan pada wajib pajak. Apabila kualitas pelayanan fiskus sangat baik maka persepsi wajib pajak terhadap pelayanan akan meningkat. Penelitian yang dilakukan Supadmi (2010) menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, aparat pajak harus meningkatkan kualitas pelayanan pajak. Wajib pajak akan merasa nyaman dengan pelayanan fiskus yang baik.

Sanksi perpajakan juga mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak, sehingga, diharapkan peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak (Mohamad Rajif, 2011). Selama ini ada anggapan dalam masyarakat bahwa sanksi perpajakan akan dikenakan hanya bila tidak membayar pajak. Padahal, kenyataannya banyak hal yang membuat wajib pajak atau masyarakat terkena sanksi perpajakan, baik itu berupa sanksi administrasi (bunga, denda, dan kenaikan) maupun sanksi pidana.

Belum lama ini, Direktorat Jenderal Pajak melakukan perubahan peraturan pajak dalam upaya menambah setoran pajak dalam negeri. Salah satu peraturan baru yang berkaitan dalam penelitian ini adalah PP No.46 Tahun 2013 mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Sasaran dalam PP No.46 Tahun 2013 adalah Wajib Pajak UKM (Usaha Kecil Menengah).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kepatuhan wajib pajak. Adapun judul dari penelitian ini adalah :

“PENGARUH PELAYANAN FISKUS, SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UKM SESUDAH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO.46 TAHUN 2013 (Survei pada Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal )”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UKM di KPP Pratama Tegal?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UKM di KPP Pratama Tegal?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UKM di KPP Pratama Tegal?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengaruh pelayanan fiskus terhadap timbulnya kepatuhan wajib pajak pelaku UKM di KPP Pratama Tegal.
2. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap timbulnya kepatuhan wajib pajak pelaku UKM di KPP Pratama Tegal.
3. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap timbulnya kepatuhan wajib pajak pelaku UKM di KPP Pratama Tegal.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti dan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Penelitian ini memberikan referensi kepada civitas akademika dan peneliti-peneliti selanjutnya dalam pembuatan makalah penelitian

perpajakan khususnya tentang pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UKM.

3. Untuk Kantor Pelayanan Pajak yang difokuskan pada KPP Pratama Tegal sebagai bahan masukan berbagai hal yang menyangkut kepatuhan Wajib Pajak yang berada di KPP Pratama Tegal.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman dan penelahan penelitian, dibuat rancangan penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang memuat teori-teori dasar yang berhubungan dengan judul penelitian dan topik permasalahan meliputi pemahaman tentang Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, PP nomor 46 Tahun 2013, Usaha Kecil dan Menengah dan tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang terkait dan pernah dilakukan sebelumnya, dan diakhiri dengan perumusan hipotesis yang nanti diuji kebenarannya.

##### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang didalamnya menguraikan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek

penelitian, populasi dan sampel, tehnik pengambilan sampel, data yang diperlukan serta tehnik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul.

#### BAB IV: ANALISIS DATA

Bab ini mencakup uraian lebih lanjut mengenai gambaran secara singkat mengenai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal Jawa Tengah, gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data dan pembahasan dijelaskan lebih rinci yang nantinya untuk disimpulkan.

#### BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dari serangkaian pembahasan, keterbatasan atau kendala–kendala dalam penelitian serta saran-saran yang dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.